

Dinamika Kepentingan dan Interaksi Sosial Pedesaan: Studi Implikasi Alih Fungsi Lahan

Dhina Yuliana¹, Faris Rahmadian¹, Nana Kristiawan¹, Selvy Anggriani Syarif¹

¹Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat, Indonesia E-mail: d3n1bah@gmail.com

Abstrak: *Land-use changes or land conversion issues not only poses a threat of ecological or environmental, but also trigger a variety of dynamics and complexity of social relations in it. West Cilebut Villages has been the target of investors and developers of housing since the 1990s, and now the West Cilebut Villages has changed from an area full of green "romantic" village, into the region filled with concrete. Therefore, this study was conducted to answer fundamental issues related to the issue of land conversion in the West Cilebut Village, first is to see the map and interests between actors in relation to land conversion in the West Cilebut Village, and second to know the social interactions dynamics that occur in West Cilebut community, following the land conversion from the farm into housing estates. The results showed that there are three main actors in relation to issues of land use change in West Cilebut Village: (1) The Housing Developer; (2) Village Apparatus / Government; (3) Society; where the three actors have a role and importance of different orientations. Meanwhile, social interaction between housing and rural communities basically shows a relationship of mutual need. Construction of housing community that luxurious and exclusive slowly turns into inclusive and reflect a reciprocity of the two communities.*

Key words: *Land-use change, actors, social interactions, rural community, housing community*

Alih fungsi lahan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain baik secara tetap maupun sementara, dan kondisi tersebut memiliki implikasi-implikasi baik umum maupun khusus. Seperti yang disebutkan oleh Kepala Studi Bencana IPB Euis Sunarti (Ratomo 2015), konversi lahan terlebih lahan pertanian tidak hanya menimbulkan dinamika dalam masyarakat dan ancaman instabilitas pangan, tetapi juga memicu berbagai potensi bencana alam karena terdegradasinya kawasan resapan air.

Lahan yang sejatinya adalah komponen krusial penopang kehidupan manusia, pada saat ini seolah dimaknai lebih secara pragmatis ekonomis. Seperti contoh kasus di kawasan Buleleng Bali, pada tahun 2014 saja setidaknya terdapat 149 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian, dan 70 persen di antaranya untuk perumahan (Anonim, 2015). Beberapa contoh kasus lainnya juga menunjukkan pola yang kurang lebih sama, dimana di suatu kawasan yang dianggap

strategis dan telah di konversi, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Kondisi tersebut setidaknya disebabkan oleh dua faktor (Irawan dalam Maulana, 2010): (1) Pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi akan menyebabkan aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat; (2) Peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani (masyarakat lokal) di sekitarnya untuk menjual lahan, ada alasan ekonomis namun pragmatis yang melandasi alasan ini.

Ekspansi properti dan perumahan di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 menunjukkan gejala peningkatan yang sangat pesat, terlebih dalam lima tahun terakhir ini. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor setidaknya menyebutkan dalam lima tahun belakangan ini telah menerbitkan 382 izin untuk perumahan, jika dirata-ratakan ada 77

perumahan dibangun setiap tahun di Kabupaten Bogor (Gunawan, 2015). Atau dengan kata lain, sudah bisa dipastikan setidaknya terdapat enam atau tujuh perumahan setiap bulan dibangun di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sebagai bagian dari sistem perkotaan Nasional yang berdekatan dengan Jakarta menjadi tempat investasi sektor properti yang sangat menarik dan paling diminati oleh investor. Senada dengan orientasi pembangunan pemerintah Kabupaten Bogor, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga menyebutkan siap untuk membangun 6.000 unit hunian murah di Bogor sebagai upaya mendukung pembangunan di kawasan Bogor (Dinisari, 2015). APERSI menyebutkan, kebutuhan harga rumah nantinya akan disesuaikan dengan harga bahan baku bangunan, pajak, biaya perizinan dan margin laba, namun prediksi harga properti yang ditawarkan tersebut berkisar antara Rp115 juta sampai Rp. 130 juta.

Dikotomi dan transisi ideal masyarakat ala Tonnies (*gemeinscahft* ke *gesselschaft*) sepertinya tidak akan dapat berjalan seperti proyeksi utopisnya apabila memang masyarakat pedesaan justru harus kehilangan berbagai modalnya (*social and economic capital*) dalam upaya transisi menuju “kemodernan”. Seperti halnya yang disebutkan Andre Gunder Frank (dalam Rahardjo, 2010), bahwa paradigma modernisasi justru mengarah pada pemusatan “kekuasaan” (dalam arti luas) yang justru menyebabkan perkembangan dan kemajuan kawasan pinggiran menjadi macet, maka bukan kemajuan yang terjadi di pinggiran sebagaimana bayangan ideal pembangunan, melainkan keterbelakangan. Menggunakan kacamata Sorokin (dalam Rahardjo 2010), disebutkan bahwa jika berbicara perubahan sosial atau komunitas maka harus dipahami juga bagaimana perubahan yang terjadi pada tingkat budaya. Dengan menekankan arti, nilai, norma, dan simbol sebagai kunci untuk memahami masyarakat, maka ilmu sosial dapat merefleksikan pola-pola dalam masyarakat yang selalu dinamis dan bertransformasi. Konversi lahan menjadi kawasan perumahan tidak hanya sebatas pada isu dampak ekonomi, namun juga bagaimana perubahan dapat terjadi hingga implikasi ikatan sosial di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat, sejauh mana alih

fungsi lahan (pembangunan perumahan) berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat di Desa Cilebut Barat.

Konsep perubahan sosial. Konsep perubahan sosial pada dasarnya merujuk pada ruang perubahan struktur dan sistem yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan merujuk dimensi struktural, kultural, dan interaksional (Martono 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti diketahui bahwa perubahan sosial juga berarti menyangkut perubahan kebudayaan dan berbagai pola-pola di dalamnya. Perubahan sosial dalam suatu masyarakat akan meliputi perubahan holistik, dari aspek stuktur sosial, sistem hingga nilai norma di dalamnya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap individu dalam masyarakat tersebut, perubahan dapat bernilai negatif (ketika mengandung pertentangan yang merugikan), atau mungkin positif (ketika membawa perubahan yang meningkatkan nilai sosial ekonomi). Perubahan juga identik dengan transisi masyarakat yang “guyub” menjadi masyarakat “patembayan”, gejala tersebut nampaknya sangat relevan apabila ditinjau pada masyarakat yang berada pada kawasan pedesaan dan dekat dengan perkotaan. Tonnies (dalam Sztompka 2011) mengembangkan konsep dikotomi masyarakat dengan *gemeiscahaft* ke *gemeinschaft* juga untuk menandakan bahwa perubahan masyarakat yang *guyub* dan tradisional sudah mengarah pada masyarakat modern. Lebih lanjut Tonnies menyebutkan bahwa masyarakat *gemeinschaft* lahir dan berkembang pada kesamaan nilai dan norma, dan interaksi sosial yang bermakna positif dengan intensitas tinggi (terdapat memiliki keertatan emosional antar satu dengan lainnya). Sedangkan masyarakat *gesselchaft*, lebih merujuk pada masyarakat yang tidak memiliki ikatan sosial kuat, bahkan kadangkala tidak mengenal nilai-norma budaya yang spesifik. Perubahan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, dalam banyak kasus alih fungsi lahan dapat menjadi pemicu utama perubahan sosial di pedesaan secara komperhensif. Menurut Widjanarko et al (2006) dampak negatif akibat alih fungsi lahan antara lain: (1) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. (2) Berkurangnya luas sawah yang

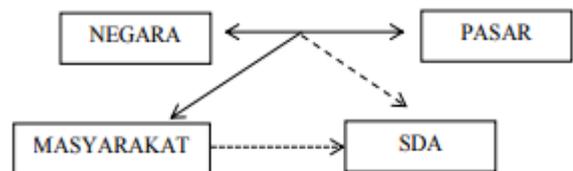
mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial (3) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya (4) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah (5) Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa yang terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun, sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah tidak memuaskan hasilnya. Berdasarkan kelima poin tersebut, dapat terlihat bahwa tidak hanya terkait dengan aspek ekologis dan pangan, namun kembali isu alih fungsi lahan erat kaitannya dengan konflik dan segregasi sosial.

Pemerintah, swasta ataupun masyarakat tidak jarang seolah saling berkompetisi dalam memperoleh akses dan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pemanfaatan objek sumber daya alam, termasuk lahan-lahan di berbagai kawasan yang tidak pernah luput dari kata “kepentingan”. Era demokrasi Indonesia pada saat ini yang mengusung sistem otonomi daerah tidak jarang justru menimbulkan dinamika dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam (termasuk di dalamnya pemanfaatan lahan), yang justru dapat semakin membuka lebar jurang kesenjangan antara pihak penguasa dan pihak masyarakat yang dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas dan kondisi hidup mereka.

Pada satu sisi, pemerintah dan/atau swasta memandang lingkungan dan sumber daya alam sebagai aspek ekonomis, sedangkan masyarakat lebih memandang sebagai aspek mutualistik yang berkaitan pula dengan kondisi hidup mereka (Antoro 2010). Namun, ketika terdapat

tekanan-tekanan tertentu dari pihak luar, maka tidak jarang masyarakat juga harus memandang objek tersebut sebatas makna ekonomis. Pihak pemerintah sebagai representasi negara yang seharusnya menjadi aktor netral dan seharusnya memihak kepentingan masyarakat, malah terkesan turut berpartisipasi dalam kontestasi antar aktor dalam sumber daya alam. Bahkan, dengan mudah kita dapat memperoleh literatur dan fakta yang menunjukkan bahwa pihak pemerintah tidak berbeda jauh dengan orientasi dan pandangan kapitalis perusahaan-perusahaan swasta yang cenderung mengabaikan pihak masyarakat. Tania Li (2012) juga menyebutkan, bahwa dalam kaitannya dengan aktor, masyarakat kerap berada pada posisi “subordinat” dan cenderung dijadikan sebatas “objek” dalam pembangunan dan regulasi. Masyarakat tidak hanya berada posisi subordinat akibat pemerintah, namun juga kekuasaan korporasi (swasta) dan termasuk juga pengusaha-pengusaha skala kecil-menengah yang menguatkan “penyimpangan” dalam istilah kedok “bisnis” atau bahkan “pembangunan” (Li 2012).

Sitorus dan Wiradi (dalam Antoro 2010) mengungkapkan, bahwa dalam kaitannya dengan hubungan antar aktor, masyarakat kerap menempati posisi yang lebih lemah.



Gambar 1. Pola Hubungan Antar Aktor (Antoro 2010)

Gambar di atas menjelaskan hubungan interaksi negara dengan pasar yang mutualistik, hubungan interaksi negara-pasar terhadap masyarakat yang bersifat hegemonik (kuat mempengaruhi), hubungan antara negara-pasar dengan SDA yang berorientasi pasar, serta hubungan antara produksi masyarakat dengan SDA yang lemah dan terus tergerus akibat dominasi aktor-aktor di atasnya. Perbedaan kepemilikan akses akan sumber daya alam dan cara pandang terhadap sumber daya tidak jarang justru menyebabkan berbagai permasalahan krusial yang tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, namun juga sosial dan ekonomi masyarakat. Keraf (2010) juga secara tidak langsung menyatakan dalam berbagai

permasalahan ekologi hingga ancaman krisis yang terjadi pada dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga faktor internal dari manusia sebagai pihak yang terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya

Konsep Interaksi Sosial. Interaksi sosial dapat dipahami sebagai hubungan-hubungan sosial yang terbangun secara dinamis antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dan kelompok (Soekanto 2010). Istilah interaksi sosial secara harfiah juga menunjukkan identitas hingga nilai-norma suatu kelompok. Interaksi tersebut kerap berbeda antara komunitas yang satu dengan yang lainnya atau antar masyarakat, konsep interaksi ini dapat bermakna sangat beragam. Interaksi antar komunitas atau masyarakat yang berbeda tidak akan lepas dari perbedaan penangkapan makna bersama (*shared meaning*), dan tidak jarang kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai dinamika hingga konflik di dalamnya.

Beberapa bentuk interaksi sosial yang terdapat dalam masyarakat (Soekanto, 2010) sebagai berikut: (1) Interaksi Sosial Asosiatif, pada dasarnya merupakan interaksi sosial yang bermakna membangun atau saling menunjukkan peran dan kontribusi yang positif antar pihak yang berinteraksi. Interaksi asosiatif dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah kerjasama, yang dimaksudkan tersebut dapat berlangsung apabila individu dapat bergerak bersama lainnya untuk mencapai sebuah tujuan dan memiliki kesadaran bahwa tujuan tersebut memiliki manfaat bagi semua. Kerjasama dapat terjadi dalam bentuk tolong-menolong, gotong-royong, dan musyawarah. Bentuk lainnya adalah asimilasi, atau sebuah proses yang ditandai dengan adanya usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorang, antar kelompok. 2) Interaksi Sosial Disosiatif, pada dasarnya merupakan interaksi sosial yang bermakna destruktif atau saling menunjukkan peran dan kontribusi yang negatif antar pihak yang berinteraksi. Interaksi disosiatif erat kaitannya dengan persaingan, perselisihan halus akibat perbedaan pendapat atau dapat juga berbentuk pertikaian yang konfrontatif. Persaingan terjadi karena usaha untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum. Sebuah persaingan berkaitan erat dengan

kepribadian seseorang, kemajuan masyarakat, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau tindak kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta dan kepentingan antar aktor dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan dan dinamika interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Cilebut Barat pasca terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi perumahan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Survei, yaitu pengambilan langsung data dari responden-responden yang telah ditentukan berdasarkan kerangka sampling.

In depth interview atau wawancara mendalam, yaitu komunikasi secara lisan yang terstruktur untuk menggali informasi tentang aktor serta interaksi-interaksi sosial yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan sudut pandang pelaku (baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung).

Observasi Lapangan, merupakan kegiatan pengamatan lapang untuk melihat gejala perubahan dan pola-pola yang secara eksplisit maupun implisit dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid.

Populasinya adalah seluruh masyarakat Kampung Babakan, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan jumlah total 644 Kepala Keluarga. Sedangkan unit analisis yang diambil adalah Kepala Keluarga di Kampung Babakan, Desa Cilebut Barat. Hal ini dilakukan secara sengaja karena unit analisis tersebut dianggap paling mampu merepresentasikan kondisi dan tujuan penelitian yang telah disusun.

Responden berjumlah 40 orang dipilih secara acak, yaitu pihak pengembang perumahan, baik tokoh masyarakat (aparatur tingkat RT – RW, tokoh pemuda), masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perumahan, masyarakat yang pernah bekerja atau sedang

bekerja di lokasi perumahan, maupun masyarakat lainnya yang memiliki informasi relevan dengan kasus yang diteliti.

HASIL

Kondisi Fisik Lokasi Penelitian. Desa Cilebut adalah sebuah wilayah yang terbentuk pada tahun 1950 dan pada tahun 1982 dimekarkan menjadi dua desa, yaitu: Desa Cilebut Timur dan Desa Cilebut Barat, kedua desa tersebut berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Fokus lokasi penelitian kami terletak di Desa Cilebut Barat, lokasinya tidak jauh dari Stasiun Kereta Api Cilebut yang telah beroperasi sejak awal abad ke-20. Dalam konteks sejarah, kawasan Cilebut merupakan kawasan yang luas dengan lahan pertanian (perkebunan), dan sering kali disebut sebagai wilayah sentra penghasil Jambu di Jawa Barat. Sejak era 1990-an kawasan Desa Cilebut Barat dengan komoditas jambu bijinya, bahkan hasil produksinya sampai hingga luar kota dan masuk pada pabrik minuman kemasan berskala besar. Meskipun saat ini, lahan pertanian di desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja ini semakin menyusut namun hasil panen Jambu (menurut klaim pemerintah) masih mencapai lebih dari 100 ton sekali panen pada rentang tahun 2012. Tahun-tahun sebelumnya bahkan hasil panen jambu lebih dari yang dipanen tersebut. Sebab saat ini luas lahan pertanian yang ada di Desa Cilebut Barat semakin berkurang, karena beralih fungsi menjadi perumahan. Diperkirakan hanya 20 persen lahan pertanian yang tersisa ditanami jambu. Pihak Pemerintah Desa Cilebut juga menyatakan, bahwa seiring meningkatnya pembangunan perumahan kini lahan pertanian yang dulu mencapai 80 persen dari luas wilayah desa sejumlah 440 hektar, semakin menyusut. Setidaknya sekitar 30 hektar lahan pertanian jambu kini berubah menjadi perumahan.

Kawasan Cilebut padahal sejak dulu dikenal dengan lokasinya yang subur dan indah, diperkuat dari beberapa cerita sesepuh kampung yang mengatakan bahwa banyak orang kompeni (Belanda) yang datang dan membeli hasil alam yaitu berupa bahan pokok seperti Gabah atau bahan bahan mentah beras karena dahulu terdapat lumbung padi, yang sekarang berada di Desa Cilebut Barat.

Pemerintah menyebutkan, lahan pertanian jambu di Desa Cilebut Barat yang masih tersisa hanya sekitar 20 persennya saja, demikian dengan lahan pertanian dengan komoditas lainnya yang semakin kritis. Sebagian warga yang masih bertahan sebagai petani jambu hanya ada di beberapa wilayah seperti di RW 6 Kampung Bojong Sempu, RW 6 Kampung Petaunan dan di RW 2 Kampung Babakan. Ketiga lokasi tersebutlah yang masih bertahan diantara pembangunan dan alih fungsi lahan yang marak terjadi di Desa Cilebut Barat. Ketiga lokasi tersebut pada dasarnya sudah “terkurung” oleh perumahan-perumahan yang jumlahnya terus meningkat pesat tiap tahunnya.

Peta Dan Dinamika Aktor. Alih fungsi lahan merupakan salah satu isu yang sarat kepentingan di dalamnya. Penelitian di Kampung Babakan, Desa Cilebut Barat juga menunjukkan secara garis besar aktor yang dapat teridentifikasi terbagi menjadi tiga pihak, yakni: (1) Pengembang Perumahan, dalam hal ini adalah pihak pengembang perumahan yakni masyarakat yang melakukan penolakan dan masyarakat yang mendukung terjadinya alih fungsi lahan; (3) Aparat Desa / Pemerintah, termasuk di dalamnya perangkat desa seperti pengurus.

Pengembang Perumahan. Pihak pengembang perumahan merupakan seseorang atau perusahaan yang bergerak di bisnis *property* sebagai pengembang (pembangun dan pemasar *property*) baik itu berupa perumahan dalam skala besar maupun kecil. Kawasan Cilebut sendiri sudah mengenal baik istilah pihak pengembang perumahan sejak sekitar dua puluh tahun lalu atau sekitar tahun 1995, kala itu perumahan di kawasan Cilebut dikenal dengan harganya yang sangat terjangkau dan lokasinya yang cukup strategis karena stasiun keretanya. Salah seorang informan bahkan pernah menyebutkan, bahwa sebelum perumahan kelas menengah menjamur dan dikenal seperti saat ini, sudah banyak rumah warga asli Desa Cilebut yang dijual dan dibeli oleh pendatang atau pekerja yang umumnya bekerja di kawasan Depok atau Jakarta. Harga tanah di kawasan Cilebut kala itu lebih murah dibandingkan dengan harga tanah di daerah Bojong Gede atau Citayam, yang notabeneanya terletak bersebelahan dengan wilayah Cilebut Hal tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya faktor

lokasi dan harga menjadi alasan utama pengembang perumahan melakukan investasi di kawasan ini. Pengembang perumahan memang telah melihat potensi kawasan Cilebut sejak lama, sehingga sampai dengan saat ini pihaknya terus melakukan investasi.

Proses jual beli lahan menemui permasalahan, yakni: (1) Legalitas lahan, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Desa Cilebut yang tidak memiliki sertifikat tanah yang resmi, beberapa informan kami bahkan menyebutkan hanya memiliki bukti fisik yang merupakan warisan dari zaman orang tuanya dulu (*letter c*, girik, dsj.) (2) Penolakan warga, hampir dalam setiap pembangunan kawasan perumahan di Desa Cilebut selalu menemui penolakan warga, namun tidak pernah terjadi penolakan yang ditunjukkan secara radikal dan dengan jalur kekerasan.

Aparat Desa / Pemerintah. Peran pihak aparat desa / pemerintah sebetulnya lebih berada pada titik hulu dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan di kawasan Desa Cilebut Barat. Pemerintah Desa Cilebut memang menyatakan bahwa membuka peluang investasi kawasan perumahan sejak tahun 1990-an. Pemerintah Desa ini Bagian Pembangunan menyebutkan, bahwa peluang investasi perumahan menjadi salah satu kontributor utama perekonomian, itulah salah satu alasan mengapa pihak pemerintah desa juga gencar “mengundang” investor. Hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat belasan perumahan dengan segmentasi pasar kelas menengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTRW mempertimbangkan perubahan fungsi ruang kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya, dan memerlukan kajian dan penilaian atas perubahan fungsi ruang tersebut secara lintas sektor, lintas daerah, dan terpusat. Namun berdasarkan fakta dilapangan, tidak jarang pihak pengembang perumahan dan pemerintah desa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah desa cenderung hanya berkomunikasi dengan pihak atas, atau pihak kecamatan dan daerah untuk investasi perumahan yang berskala menengah – besar. Pihak pemerintah bahkan mengklaim bahwa apa yang telah dilakukannya berhak dan sah secara undang-undang, apalagi jika merujuk pada

berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah:

Kebijakan pemerintah terkait dengan perumahan murah sebagai strategi pembangunan, ditambah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang menyebutkan siap untuk membangun 6.000 unit hunian murah di Bogor sebagai upaya mendukung pembangunan di kawasan Bogor. Akibat penerapan kebijakan, ialah alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan dianggap memiliki *legal standing* dan diterapkan dalam kondisi apapun, padahal diatas rekomendasi pemerintah daerah tersebut masih terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan Pangan dan Undang-Undang Pokok Agraria yang jelas membatasi dan merasionalkan hasrat ekspansi kapitalisme.

Pemerintah merujuk pada kebijakan penanaman modal dan perizinan sesuai Paket Kebijakan Oktober Nomor 23 Tahun 1993 yang pada dasarnya memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pemrosesan perizinan lokasi. Akibat kebijakan ini ialah terjadi peningkatan sangat nyata dalam hal permohonan izin lokasi baik untuk kawasan industri, permukiman skala besar, maupun kawasan pariwisata.

Pihak pemerintah Desa Cilebut nampaknya sepakat bahwa pembangunan yang ideal hanya dapat dicapai melalui mengubah pola-pola yang lama, atau dalam hal ini adalah memasukkan investor sebanyak-banyaknya dalam berbagai hal. Hal ini tidak lepas dari perbaikan faktor transportasi kereta api, sejak tahun 2007 pihak pemerintah desa sudah mengetahui bahwa akan terjadi perbaikan besar-besaran moda transportasi tersebut. Jika dilihat dari logika yang mendasari pihak pemerintah dalam pembangunan, maka kehendak untuk “memperbaiki” tersebut juga muncul akibat modernisasi transportasi dan kapitalisasi lahan di kawasan perkotaan besar. Dalam hal ini, pihak pemerintah juga memiliki “strategi” ekonomi dengan menjadikan kawasan Cilebut sebagai kawasan yang ramah “pekerja”, diantaranya dengan memposisikan kawasan perumahan dekat dengan stasiun kereta api.

Masyarakat Desa. Isu alih fungsi lahan dimata masyarakat telah menjadi dilema tersendiri yang membingungkan. Seperti seorang informan kami (KI 50 Tahun) yang

merupakan seorang petani jambu dan masih berkegiatan sampai saat ini, menyatakan bahwa alih fungsi lahan pada dasarnya bukanlah suatu opsi pembangunan, apalagi jika dikatakan akan “memperbaiki” kesejahteraan masyarakat. Beliau memiliki lahan seluas 1 hektar yang hampir seluruhnya ditanami jambu, dan setiap panennya ia mengatakan pada saat ini masih bisa memperoleh hasil 2.5 s.d 3 ton. Padahal dalam satu tahun, jambu bisa 2 sampai 3 kali panen besar, dan harga Hasil panen jambunya relatif stabil diantara Rp. 1.500 – 2.500 / kg. Hasil panen tersebut juga biasanya langsung ditampung oleh pedagang pengumpul yang datang saat panen jambu. Ketika masa kejayaannya, pedagang pengumpul atau tengkulak tersebut adalah masyarakat Desa Cilebut Barat itu sendiri, namun pada saat ini banyak justru yang datang dari luar, selanjutnya pedagang pengumpul tersebutlah yang memasarkan jambu ke luar daerah. Hal senada juga disebutkan oleh seorang informan yang merupakan mantan seorang petani (HY 46 tahun), bahwa masyarakat dihadapi pada pilihan yang tidak menguntungkan sama sekali, masyarakat tidak diberi opsi lain selain harus menjual lahan milik mereka. Masyarakat pada dasarnya masih banyak yang menaggap bahwa sektor pertanian tetap memiliki potensi yang luar biasa di masa mendatang, namun juga berada pada posisi yang membingungkan karena isu yang kuat beredar tentang krisis air yang juga akan melanda dimasa mendatang.

Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat desa di kawasan Desa Cilebut Barat pada dasarnya terbagi menjadi dua pihak dalam kaitannya dengan isu alih fungsi lahan, pada satu sisi masyarakat mendukung terjadinya alih fungsi lahan, namun pada sisi lainnya masyarakat juga menolak alih fungsi lahan, seperti disebutkan sebagai berikut:

Masyarakat Pendorong Alih Fungsi Lahan, masyarakat yang tergolong dalam masyarakat ini umumnya adalah masyarakat yang tidak memiliki lahan sama sekali, masyarakat yang memiliki lahan yang sangat luas, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap di desa dan masyarakat yang diberi “upah” oleh pihak pengembang perumahan. Masyarakat pendorong alih fungsi lahan pada dasarnya banyak yang berharap banyak pada kehadiran

sektor perumahan untuk membawa lapangan pekerjaan baru.

Masyarakat Penolak Alih Fungsi Lahan, masyarakat yang tergolong dalam masyarakat ini umumnya adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani dengan lahan sedang, masyarakat ini menolak alih fungsi lahan karena merasa sektor pertanian dan/atau perkebunan masih menjanjikan pendapatan yang berkelanjutan dan keamanan penghidupan (prinsip subsistensi).

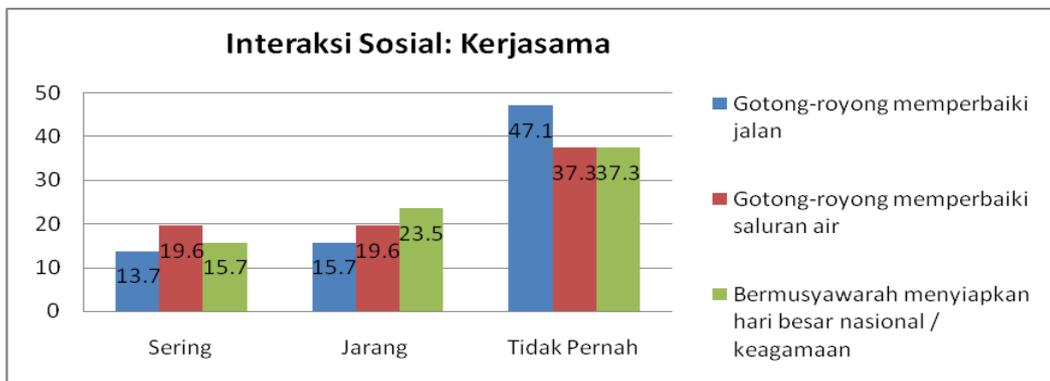
Interaksi Sosial dalam Kerangka Asosiatif. Masyarakat Desa Cilebut Barat sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang penuh dengan kawasan sawah yang hijau, masyarakat yang guyub dan sederhana dan bahkan memiliki lembaga adat yang menjunjung tinggi budaya adat. Walaupun lembaga sunda tersebut pada dasarnya tidak pernah melembaga secara formal, tetapi eksistensinya menunjukkan bahwa nilai dan norma “sunda” melekat pada masyarakat Desa Cilebut Barat. Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu karakteristik utama masyarakat Desa Cilebut Barat sebetulnya adalah menghindari konfrontasi. Pada masa lalu masyarakat Desa Cilebut Barat dikenal kuat dengan sifat dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.. Karena dalam konteks pertanian di Desa Cilebut Barat, hubungan antar petani didasari pada landasan kepentingan resiprositas. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana sistem gotong royong dalam kaitannya dengan perkebunan jambu, atau tanaman buah yang menjadi komoditas utama sejak belasan tahun lalu. Setidaknya keberadaan tanaman jambu menghasilkan relasi dan interaksi sosial yang harmonis dan konstruktif, seperti:

Pada masa Pra-Panen Jambu, masyarakat Desa Cilebut Barat umumnya memanfaatkan masa ini untuk bersama-sama mengatasi persoalan produktifitas jambu antar petani, kendala-kendala yang dihadapi, membersihkan lahan bersama-sama hingga sebatas memanfaatkan kawasan asri di perkebunan jambu mereka untuk berdiskusi santai. Walaupun memang terdapat kelompok tani, namun kelompok tani tersebut menurut informan kami tidaklah aktif, dan justru kegiatan spontan yang berlandaskan pada kekerabatan dan gotong royong menjadi

gambaran khas masyarakat Desa Cilebut Barat ketika pra-panen.

Pada masa Panen Jambu, masyarakat Desa Cilebut Barat umumnya memanfaatkan masa ini untuk memperkerjakan kaum muda atau bahkan ibu-ibu untuk membantu di lahan perkebunan. Salah seorang informan kami yang seorang Ibu Rumah Tangga bahkan menyatakan, ketika masa panen memang muncul seperti hubungan “patron-klien”, namun tidak terlihat adanya kesenjangan atau perilaku yang kaku.. Masa panen bahkan kerap dianggap sebagai “masa-masa senang bersama”, dimana walaupun lahan perkebunan hanya dimiliki oleh segelintir orang, distribusi jambu tersebut (baik dalam bentuk buah jambu itu sendiri atau uang) mengalir hingga anak kecil di ujung-ujung kampung.

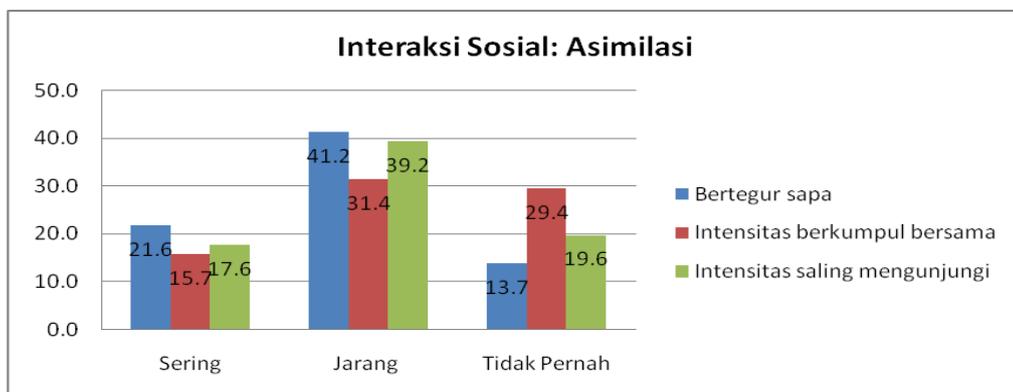
Pernyataan diatas menunjukkan tahun 1990 – 2000 menunjukkan masyarakat desa yang penuh dengan romantisme. Sampai pada akhirnya pasca tahun 2000 mulai marak isu alih fungsi lahan di kawasan Desa Cilebut Barat. Kehadiran perumahan pasca tahun 2000 semakin menjadikan masyarakat desa “mengubah” pola-pola dan kegiatan positif (dalam bentuk gotong royong) yang terkait dengan perkebunan jambu mereka. Pada saat ini hanya sedikit pihak yang memiliki lahan jambu dengan luas lebih dari 0.8 ha, walaupun ada kegiatan gotong royong atau bersih-bersih bersama tidak seerat ketika masih masif perkebunan jambu.



Gambar 3. Interaksi Sosial dalam hal Kerjasama pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut Barat, Tahun 2015

Poin selanjutnya yang masih berada dalam kerangka positif atau asosiatif, adalah upaya antara dua pihak (masyarakat desa dan perumahan) saling melebur, baik dalam

kehidupan sehari-hari dengan ditunjukkan bertegur sapa, berkumpul bersama, hingga saling mengunjungi. Sepeti ditunjukkan pada Gambar 4.



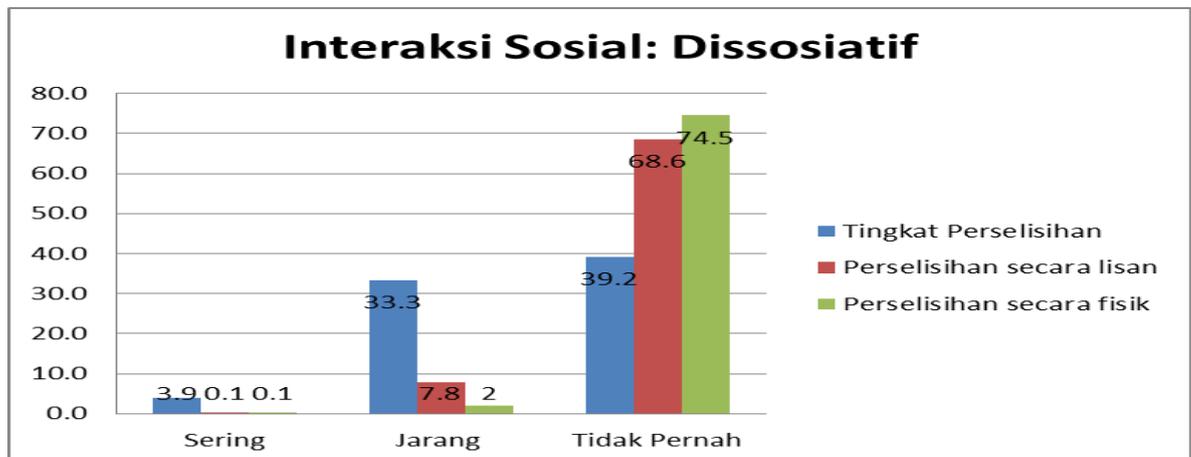
Gambar 4. Interaksi Sosial dalam hal upaya Asimilasi pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut Barat, Tahun 2015

Data di atas, menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam hal upaya asimilasi dominan pada pernyataan jarang Asimilasi. Interaksi sosial dalam asimilasi ini antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat dapat dilihat dari intensitas bertegur sapa, berkumpul bersama dan saling mengunjungi. Dari ketiga kegiatan tersebut, intensitas yang dilakukan sering, jarang dan tidak pernah. Berdasarkan data di atas, intensitas bertegur sapa responden menyatakan sering sebanyak 21.6%. Sedangkan untuk bertegur sapa intensitas jarang sebesar 41.2% dan tidak pernah sebesar 13.7%. sementara dilihat dari intensitas berkumpul antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat, dari 40 Responden menyatakan sering berkumpul sebesar 15.7%. sedangkan untuk intensitas berkumpul kategori

Interaksi Sosial dalam Kerangka Disosiatif. Selain perilaku atau interaksi yang konstruktif, terdapat pula interaksi sosial atau perilaku yang mengarah pada hal yang negatif. Penggunaan istilah negatif disini dapat memiliki arti sebagai perselisihan pendapat, hingga konfrontasi secara fisik. Salah satu potensi konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Cilebut Barat atau adalah antara masyarakat kampung dengan masyarakat perumahan adalah fenomena “eksklusifitas” yang dimiliki oleh masyarakat perumahan. Kontruksi “pagar” sebetulnya juga menunjukkan simbol segregasi sosial antara masyarakat “dalam perumahan” dengan “luar perumahan”. Dinamika yang

jarang sebesar 31.4% dan intensitas berkumpul kategori tidak pernah sebesar 29.4%. Selain itu, jika dilihat dari intensitas saling mengunjungi antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat, dari 40 responden yang menyatakan orang kompleks saling mengunjungi dengan orang desa sebesar 17.6%. Sementara responden menyatakan jarang 39.2%. Sedangkan untuk responden yang menyatakan tidak pernah saling mengunjungi antarkeduanya sebesar 19.6%. Dari pernyataan responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata interaksi sosial bentuk asimilasi menunjukkan kategori jarang. Hal ini dapat dilihat dari intensitas bertegur sapa, intensitas berkumpul bersama dan saling mengunjungi antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat.

terjadi di Indonesia menunjukkan fenomena masyarakat perumahan kerap berkembang ke arah yang negatif tersebut. Perumahan dibangun dengan tujuan untuk membatasi diri dari persoalan sosial maupun keamanan lingkungan. Komunitas berpagar di Indonesia dihuni oleh mereka yang bukan mewakili golongan kaya raya semata. Mereka juga berasal dari “kalangan menengah pekerja” yang mempunyai kecenderungan konsumsi dan gaya hidup mewah. Hal ini seperti ditunjukkan dalam dua kasus yang terlihat di kawasan Desa Cilebut Barat:



Gambar 5. Interaksi Sosial dalam hal Disosiatif pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut Barat.

Perselisihan dalam Membangun Jembatan, masyarakat desa dan salah satu perumaha di sebelah timur Kampung Babakan pada sekitar tahun 2010 mempersoalkan pembangunan jembatan yang rencananya akan menghubungkan langsung antara RT 03 / RW 03 Desa Cilebut Barat dengan bagian selatan perumahan tersebut. Persoalan muncul ketika sebagian masyarakat perumahan enggan “melubangi” tembok di sekitar perumahan karena khawatir dengan maling, rampok, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bagaimana sebetulnya masyarakat perumahan ditawarkan dengan eksklusifitas individual, yang seolah terpisah dari masyarakat desa di sekitarnya.

Perselisihan dalam Membiarkan Anak-Anak Bermain, masyarakat perumahan pada awalnya terlihat memproteksi anak-anaknya untuk bermain di kawasan sekitar perumahan, atau kawasan yang sudah masuk ke wilayah Desa Cilebut Barat. Hal ini menurut salah seorang informan kami dikarenakan kekhawatiran mereka terhadap penculikan hingga melakukan aktivitas yang kurang higienis.

Kedua hal tersebut menunjukkan “masyarakat desa” beserta pemukimannya dikonstruksikan secara berbeda oleh masyarakat perumahan. Walaupun sebetulnya masyarakat desa sempat tersinggung, namun pada akhirnya kedua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Jembatan pada akhirnya dibangun walaupun harus mencari berbagai donatur, dan anak-anak pun lambat laun dapat bermain ke kawasan “belakang” (atau istilah orang perumahan menyebut kawasan desa sekitarnya) untuk jajan ke warung atau bahkan turut bermain di lapangan. Adapun bentuk interaksi sosial disosiatif yang kemungkinan terjadi dapat dijelaskan dalam gambar 5 tentang Interaksi Sosial Disosiatif.

Gambar 5 menunjukkan bahwa interaksi sosial disosiatif dapat dilihat dari perselisihan secara lisan dan perselisihan secara fisik. Adapun tingkat perselisihan antara orang kompleks dengan warga Desa Cilebut Barat dari 40 responden menyatakan tidak pernah berselisih dengan warga Desa Cilebut Barat sebesar 74.5%. Sementara responden yang menyatakan tingkat perselisihan jarang sebesar

2% dan responden menyatakan tidak pernah sebesar 0.1%. Sedangkan untuk perselisihan secara lisan, orang kompleks dengan warga perumahan menyatakan tidak pernah berselisih secara lisan dengan warga desa Cilebut Barat sebesar 68.6%. Sementara responden menyatakan jarang berselisih secara lisan sebesar 7.8% dan menyatakan sering sebesar 0.1%. Selain itu, jika dilihat dari perselisihan secara fisik, responden menyatakan tidak pernah berselisih secara fisik antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat sebesar 39.2%. Sedangkan responden menyatakan jarang berselisih secara fisik sebesar 33.3% dan menyatakan sering berselisih sebesar 3.9%. Berdasarkan penjelasan tersebut, warga perumahan dengan warga desa Cilebut Barat tidak pernah melakukan perselisihan baik secara lisan maupun secara fisik

PEMBAHASAN

Terkait dengan dua permasalahan utama tersebut, khususnya terkait poin dua atau penolakan warga, pihak pengembang perusahaan telah memiliki “solusi” yang sifatnya jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang dilakukan dengan strategi pembelian lahan langsung dan konversi lahan belakangan ketika dirasa situasi sudah aman. Strategi tersebut memang nampaknya umum diterapkan oleh berbagai pihak pengembang perumahan, seperti berikut:

Proses Tahap I, pada tahap ini pihak pengembang perusahaan melakukan pendekatan terhadap aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat (Tahun 2004 – 2010). Proses diskusi bersama-sama seluruh masyarakat minim pada tahap ini, proses diskusi mungkin hanya terjadi di kalangan terbatas.

Proses Tahap II, tahap ini umumnya terjadi menjelang tenggat waktu pembangunan kawasan perumahan, atau dalam kasus di lokasi penelitian kami terjadi sekitar 2010 – 2013. Pada tahap ini pihak pengembang perumahan lebih menggunakan upaya yang persuasif intensif dan masih terdapat juga upaya-upaya dialogis untuk membujuk masyarakat yang masih menolak dalam upaya alih fungsi lahan. Namun berdasarkan informan kami, pada tahap ini pihak perusahaan lebih gencar diantaranya dengan menawarkan “tukar guling” lahan, atau harga yang bahkan lebih tinggi.

Kondisi tersebut pada dasarnya telah menunjukkan bagaimana orientasi kepentingan dari pihak pengembang perumahan yang **berada pada landasan kepentingan ekonomi ekspansional**. Prinsip utama pihak pengembang adalah jelas sesuai dengan tesis kapitalis klasik, memperoleh untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Mereka bahkan tidak memposisikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pertimbangan pembangunan, hal ini dapat terlihat dari upaya dialogis yang bersifat inklusif dan menyeluruh yang sangat minim.

Orientasi kepentingan pihak pemerintah jelas **berlandaskan pada logika kepentingan “memperbaiki” dengan investasi (trickle down effect)** dalam kaitannya upaya alih fungsi lahan dari pertanian dan perkebunan. Namun kondisi tersebut juga diiringi dengan kehendak untuk memperbaiki wilayahnya dari “tidak modern” menuju “modernitas” dengan memasukkan investor-investor secara masif. Pihak pemerintah juga cenderung memposisikan diri sebagai “pemegang otoritas” sentral dalam kaitannya dengan pemilihan investor, hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya ruang diskusi dan musyawarah antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan juga pengembang perumahan. Pemerintah terlihat masih memposisikan masyarakatnya sebagai objek pembangunan, seperti halnya disebutkan oleh Keraf (2010) bahwa berbagai macam krisis (dari sosial hingga ekologi) yang saat ini muncul disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah memposisikan masyarakat sebagai “subjek”. Pemerintah bahkan dengan “kasar” menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang tidak menjanjikan, dan membiarkan masyarakat pedesaan terlepas dari sektor pertanian untuk secara mandiri bersaing dalam kompetisi lapangan pekerjaan yang sangat bebas dan luas.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebetulnya tidak seluruh masyarakat Desa Cilebut Barat menjual lahannya atas nama kepentingan ekonomi, namun juga ternyata motif sosial. Hal ini seperti disebutkan oleh beberapa informan kami yang pada awalnya memposisikan diri menolak alih fungsi lahan, namun ketika mereka dipengaruhi oleh kerabat atau tetangga dekat mereka sendiri akhirnya mereka menjual lahan mereka. Indikasi tersebut pada dasarnya menunjukkan **orientasi sosial untuk menjaga solidaritas** menjadi salah landasan masyarakat pada akhirnya menjual lahan mereka. Beberapa informan menyebutkan, bahwa mereka jauh lebih mempercayai dan mendengarkan saran dari kerabat atau tetangga dekat mereka terkait dengan jual beli lahan, walaupun pada dasarnya saran tersebut memiliki substansi yang sama seperti yang disebutkan oleh masyarakat lain atau pihak pemerintah atau pihak pengembang itu sendiri.

Kerabat atau tetangga dekat mereka pada umumnya mengingatkan jika lahan tidak dijual, maka dikhawatirkan akan muncul persoalan-persoalan baru, diantaranya seperti: (1) Perasaan tidak suka antar tetangga; (2) Dikucilkan dari tetangga; (3) Ancaman penggusuran. Tiga alasan utama tersebut pada akhirnya mampu mempengaruhi masyarakat yang pada awalnya menolak alih fungsi lahan, menjadi bersedia dan bahkan mendukung (dengan kembali mempengaruhi kerabat atau tetangga yang menolak) untuk menjual lahan mereka. Kerabat / tetangga dekat mereka tidak memiliki motif ekonomi di balik upaya “mempengaruhi” tersebut, seorang informan bahkan menyatakan bahwa tujuan kerabat atau tetangga mereka itu adalah baik, sehingga jauh lebih layak dipercaya dibandingkan dengan iming-iming atau upaya mempengaruhi yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak dekat dengan mereka atau pemerintah.

Kondisi tersebut secara tidak langsung juga telah menunjukkan “paradoks solidaritas”, diantaranya dengan kerabat atau tetangga yang disatu sisi ingin “menolong” orang atau keluarga yang dianggap “terancam” karena menolak alih fungsi lahan, dan alasan tersebut dilakukan agar relasi sosial tetap terjaga dan harmonis. Namun di sisi lain, mereka secara tidak langsung juga membiarkan orang atau keluarga yang dianggap “terancam” karena menolak alih fungsi lahan tersebut terlepas dari sektor subsisten penghidupannya, yakni sektor pertanian dan harus menghadapi berbagai implikasi alih fungsi lahan yang jauh lebih luas khususnya terkait dengan aspek ekonomi mereka.

Berdasarkan Gambar 3 interaksi sosial antara masyarakat desa dan masyarakat perumahan dalam bentuk kerjasama menunjukkan bahwa tingkat kerjasama dilihat dari gotong-royong memperbaiki jalan, gotong-royong memperbaiki saluran air dan bermusyawarah menyiapkan hari besar nasional atau keagamaan. Orang kompleks tidak pernah melakukan gotong royong memperbaiki jalan sebesar 47.1%. Sementara responden menyatakan jarang gotong-royong memperbaiki jalan sebesar 15.7% dan sering gotong royong memperbaiki jalan sebesar 13.7%. Sementara dilihat gotong-royong memperbaiki saluran air dari 40 responden menyatakan tidak pernah sebesar 37.3%. Sedangkan yang menyatakan jarang bergotong-royong sebesar 19.6% serta menyatakan sering bergotong royong memperbaiki saluran air sebesar 19.6%. Sedangkan dilihat dari kegiatan bermusyawarah menyiapkan hari besar nasional atau keagamaan

menyatakan tidak pernah bermusyawarah sebesar 37.3%. Sementara responden menyatakan jarang bermusyawarah sebesar 23.5% serta responden yang menyatakan sering bermusyawarah antara orang kompleks dengan warga desa Cilebut Barat sebesar 13.7%. Dengan demikian dapat ditunjukkan bawah interaksi sosial dalam bentuk kerjasama berada pada dominan pada pernyataan tidak pernah.

Pada dasarnya interaksi sosial dalam kerangka asosiatif ini masih dominan pada pernyataan tidak pernah, atau dengan kata lain masyarakat desa dan perumahan belum sepenuhnya menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau upaya “membaur” yang lebih dalam. Walaupun demikian, kami melihat bahwa konstruksi orang perumahan yang serba mewah, berpendidikan tinggi, memiliki pakaian yang lebih bagus dan lain sebagainya tidak menjadi penghalang utama dalam landasan interaksi antara masyarakat pedesaan dan perumahan. Bahkan kami melihat terdapat potensi konstruksi nilai-norma baru (*localize*) yang dibangun oleh masyarakat desa dan perumahan, diataranya dengan sudah ada upaya membangun jalan bahkan memperbaiki saluran air secara bersama-sama, saling bertegur sapa ketika bertemu dan bahkan membiarkan anak-anak perumahan juga bermain di kawasan Desa Cilebut Barat.

SIMPULAN

Secara garis besar terdapat tiga aktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan di kawasan Desa Cilebut Barat. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan serta orientasi terhadap alih fungsi lahannya masing-masing. Ketiga aktor tersebut adalah: (1) Pengembang Perumahan: dengan kepentingan ekonomi ekspansional; (2) Aparat Desa / Pemerintah: dengan kepentingan “memperbaiki” masyarakat (dengan investasi dan berharap terjadinya *trickle down effect*); (3) Masyarakat: dengan kepentingan untuk menjaga relasi sosial, namun disatu sisi kondisi tersebut memunculkan paradoks solidaritas (*solidarity paradox*).

Interaksi antara masyarakat perumahan dan masyarakat pedesaan pada dasarnya menunjukkan hubungan yang saling membutuhkan (resiprokal). Dalam hal interaksi

yang sifatnya asosiatif, walaupun data interaksi sosial dalam kerangka asosiatif ini masih dominan pada pernyataan tidak pernah, atau dengan kata lain masyarakat desa dan perumahan belum sepenuhnya menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau upaya “membaur” yang lebih dalam. Kondisi tersebut juga senada dengan dalam hal interaksi yang bersifat disosiatif dimana data tidak menunjukkan sebagian besar responden menyatakan “tidak pernah” terhadap perselisihan atau konflik yang bersifat laten maupun manifes. Konstruksi “orang perumahan” yang mewah, eksklusif lambat laun berubah menjadi cair dan inklusif. Mereka menjadi pihak yang saling membutuhkan dan menjalankan hubungan yang resiprokal dalam berbagai hal, dari pekerjaan hingga keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro KS. 2010. Konflik-konflik sumberdaya alam di kawasan pertambangan pasir besi: studi implikasi otonomi daerah (studi kasus di kabupaten Kulon Progo provinsi daerah istimewa Yogyakarta). [tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 149 hal.
- Catur TB, Joko Purwanto, Rhina Uchyani F dan Susi Wuri Ani. 2010. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Caraka Tani. [internet]. [dikutip 16 Januari 2016). Dapat diunduh dari: fp.uns.ac.id/jurnal/caraka%20XXV_1-38-42.pdf
- Ever H. 1994. *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and Developing Market*. English [UK]: Routledge
- Keraf AS. 2010. Etika lingkungan hidup. Jakarta [ID]: Kompas. 408 hal.
- Koentjaraningrat. 1977. Masyarakat Desa Masa Kini. Jakarta [ID]: Universitas Indonesia Press.
- Li TM. 2012. *The Will to Improve: perencanaan, kekuasaan dan pembangunan*. Jakarta [ID]: Marjin Kiri.

- Martono N. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta [ID]: Rajawali Press.
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta [ID]: Rajawali Press.
- Soemardjan S. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta [ID]: Penerbit Komunitas Bambu
- Tulak P. 2009. Analisis tingkat kesejahteraan dan strategi nafkah rumahtangga petani transmigran (studi sosio-ekonomi perbandingan di tiga kampung di Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat). [tesis]. Bogor (ID): IPB
- Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta [ID]: UGM Press.
- Wirawan, IB. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta [ID]: Prenadamedia Group.
- Widjanarko. 2006. *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Prosiding seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN, Jakarta.